



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL RAHIM MAHMUDA**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **93342**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **995.000.000**

1. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/100 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/36 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
5. Tanah Seluas 470 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **338.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2,0 G A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **89.650.000**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **100.638.500**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **176.825.716**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **----**



Sub Total	Rp.	1.700.114.216
III. HUTANG	Rp.	30.981.996
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.669.132.220

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.